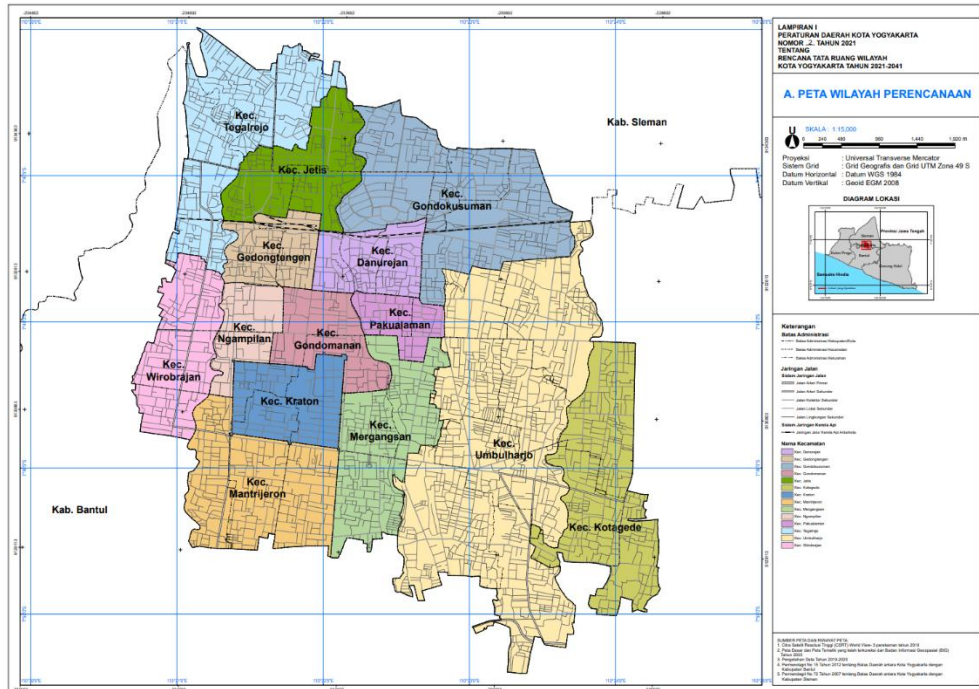


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



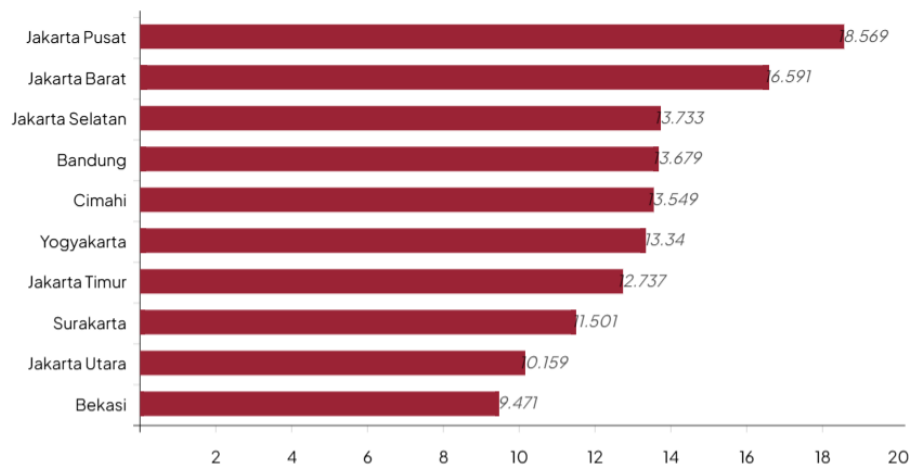
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Yogyakarta
(Sumber: Perda Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2021)

Kota Yogyakarta terletak di bagian tengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah administratifnya sekitar 32,82 km², menjadikannya salah satu kota dengan luas relatif kecil di Indonesia namun memiliki intensitas aktivitas perkotaan yang tinggi (BPS Kota Yogyakarta, 2025). Secara administratif, batas wilayah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan, budaya, dan pariwisata. Identitas tersebut tercermin dari tingginya konsentrasi institusi pendidikan, aktivitas seni-budaya, serta mobilitas wisatawan domestik dan mancanegara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta (2025), jumlah penduduk Kota Yogyakarta mencapai ±422.000 jiwa dengan kepadatan lebih dari 12.000 jiwa/km² pada luas wilayah sekitar 32,82 km². Kepadatan tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai salah satu kota terpadat di Indonesia dalam skala kota kecil.

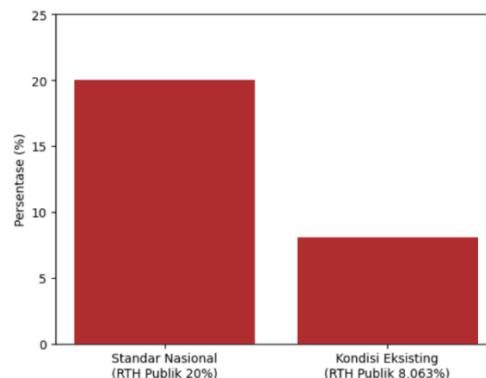
Kondisi ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap ketersediaan ruang terbuka dan ruang sosial yang mampu mengakomodasi aktivitas masyarakat secara inklusif.



Gambar 1.2 Daftar Kota di Indonesia Menurut Kepadatan Penduduk
(Sumber: Badan Pusat Statistika Nasional, 2025)

Kebutuhan ruang publik di Kota Yogyakarta terus meningkat seiring dominasi kelompok usia produktif dan pelajar. Lebih dari 60% penduduk berada pada rentang usia 15–64 tahun (BPS Kota Yogyakarta, 2025), sementara wilayah DIY menampung lebih dari 300.000 mahasiswa (BPS DIY, 2024) dan menerima lebih dari 6 juta kunjungan wisatawan pada tahun 2024 (Dinas Pariwisata DIY, 2024). Karakter demografis ini menunjukkan bahwa Yogyakarta merupakan kota pembelajar (learning city) dengan kebutuhan tinggi terhadap ruang interaksi sosial, diskusi, kolaborasi, dan pembelajaran informal di luar ruang kelas formal.

Namun demikian, ketersediaan ruang publik secara kuantitatif masih belum memenuhi standar nasional. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan minimal sebesar 30%, dengan 20% di antaranya merupakan RTH publik.



Gambar 1.3 Perbandingan Kebutuhan dan Ketersediaan RTH Publik Kota Yogyakarta
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2025)

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (2025), capaian RTH publik Kota Yogyakarta baru mencapai 8,063%, sementara RTH privat sekitar 15,28%, sehingga total RTH kota baru sebesar 23,35%. Selisih sekitar 11,9% dari standar RTH publik menunjukkan adanya kekurangan signifikan dalam penyediaan ruang terbuka yang dapat diakses masyarakat secara luas.

Berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan terkini, Kota Yogyakarta hanya memiliki satu kategori Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP), yakni taman RT/RW yang tersebar di 14 kemantren. Secara total terdapat 53 RTHP dengan luasan yang beragam di setiap wilayah. Tabel berikut menyajikan rincian luas RTHP pada masing-masing kemantren di Kota Yogyakarta.

Tabel 1.1 Total Luas RTH Publik Per Kemantren

No	Kemantren	Total Luas (m ²)	Luas Wilayah (%)
1	Mantrijeron	896	3.00
2	Kraton	820	2.75
3	Mergangsan	2.412	8.08
4	Umbulharjo	10.942	36.67
5	Kotagede	3.013	10.10
6	Gondokusuman	3.921	13.14
7	Danurejan	456	1.53
8	Pakualaman	1.018	3.41
9	Gondomanan	862	2.89
10	Ngampilan	228	0.76
11	Wirobrajan	340	1.14
12	Gedongtengen	495	1.66
13	Jetis	895	3.00
14	Tegalrejo	3.193	10.70
Total		29.840	100.00

(Sumber: DLH Kota Yogyakarta, 2022)

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Per Kemantren

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (per km ²)
1	Mantrijeron	13.246
2	Kraton	15.509
3	Mergangsan	13.799

4	Umbulharjo	8.672
5	Kotagede	11.932
6	Gondokusuman	10.841
7	Danurejan	19.027
8	Pakualaman	16.381
9	Gondomanan	12.774
10	Ngampilan	21.327
11	Wirobrajan	15.968
12	Gedongtengen	19.429
13	Jetis	15.702
14	Tegalrejo	12.661
Total Penduduk		12.664

(Sumber : Data BPS Kota Yogyakarta, 2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, distribusi Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) belum merata antar-kemantren. Beberapa wilayah dengan kepadatan tinggi seperti Ngampilan dan Gedongtengen memiliki luasan ruang terbuka yang relatif terbatas dibandingkan kebutuhan penduduknya. Kondisi eksisting juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa taman kota seperti Gajahwong *Educational Park*, distribusi dan kualitas ruang terbuka hijau belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok usia dan aktivitas sosial yang beragam. Keterbatasan fasilitas pendukung, aksesibilitas, serta aspek kenyamanan ruang turut menyebabkan pemanfaatan ruang publik belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya intensitas pemanfaatan taman kota tertentu serta munculnya praktik alih fungsi ruang-ruang nonformal menjadi ruang publik sementara.



Gambar 1.4 Gajahwong Educational Park
(Sumber: DLH Kota Yogyakarta, 2024)

Fenomena penggunaan ruang nonformal seperti pemanfaatan ruas jalan, salah satunya di koridor Jembatan Kewek menuju Malioboro, menunjukkan bahwa masyarakat secara

spontan mencari ruang sosial yang belum sepenuhnya terfasilitasi secara formal. Penutupan akses Jembatan Kewek sejak akhir tahun 2025 hingga rencana revitalisasi pada April 2026 menyebabkan perubahan signifikan pada dinamika ruang kota di sekitarnya. Jalan yang biasanya ramai oleh kendaraan bermotor berubah menjadi ruang kosong yang kemudian dimanfaatkan anak-anak untuk bermain sepeda, sepak bola, hingga melakukan aktivitas rekreasi sederhana. Ruang tersebut pada dasarnya bukan diperuntukkan sebagai ruang publik, melainkan ruang sirkulasi kendaraan. Namun demikian, masyarakat tampak menikmati aktivitas bermain dan berkumpul di area tersebut, meskipun kondisi keamanannya sangat minim. Fenomena ini menegaskan adanya kesenjangan (*gap*) antara ketersediaan ruang publik yang ada dengan kebutuhan aktual masyarakat, sekaligus menunjukkan bahwa warga kota sesungguhnya sangat membutuhkan ruang publik yang nyaman, aman, dan dapat diakses secara bebas selama 24 jam.



Gambar 1.5 Anak-Anak Bermain di Jalanan Jembatan Kewek
(Sumber: harianjogja.com, 2025)

Di sisi lain, Yogyakarta telah memiliki ruang publik tertutup milik pemerintah seperti Taman Budaya Yogyakarta (TBY) dan Taman Budaya Embung Giwangan. TBY berfungsi sebagai pusat kegiatan seni dan pertunjukan budaya yang bersifat terjadwal, sedangkan Taman Budaya Embung Giwangan menggabungkan ruang pertunjukan dengan lanskap embung sebagai ruang komunitas. Meskipun kedua fasilitas tersebut berperan penting dalam mendukung kegiatan seni-budaya, karakter ruangnya cenderung formal dan berbasis event, sehingga belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang belajar informal harian yang fleksibel dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat lintas usia. Tipologi ruang yang dominan tertutup dan berbasis panggung pertunjukan belum mengintegrasikan fungsi literasi, diskusi, dan kolaborasi dalam konfigurasi ruang yang cair antara dalam dan luar.



Gambar 1.6 Taman Budaya Yogyakarta
(Sumber: tby.jogjaprovo.go.id, 2022)



Gambar 1.7 Taman Budaya Embung Giwangan
(Sumber: Instagram TBY Embung Giwangan)

Dalam konteks kota pendidikan, kebutuhan ruang publik tidak lagi terbatas pada fungsi rekreasi konvensional, melainkan memerlukan ruang publik edukatif yang mampu mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*), literasi, serta interaksi sosial produktif. UNESCO (2016) menekankan bahwa kota pembelajar membutuhkan dukungan ruang-ruang komunal yang memungkinkan pertukaran gagasan dan akses pengetahuan secara inklusif. Dengan demikian, ruang publik edukatif menjadi infrastruktur sosial yang strategis bagi kota pendidikan seperti Yogyakarta.

Lebih lanjut, pendekatan ruang publik edukatif hibrida menjadi relevan sebagai respons terhadap kondisi tersebut. Ruang publik edukatif hibrida dipahami sebagai ruang komunal yang mengintegrasikan fungsi ruang terbuka (*outdoor public space*) dan ruang tertutup (*indoor learning space*) dalam satu kesatuan sistem spasial yang saling terhubung dan fleksibel. Konsep ini memungkinkan transisi ruang yang cair antara aktivitas luar ruang dan dalam ruang, sehingga mendukung keberagaman aktivitas seperti membaca buku, diskusi komunitas, pameran interaktif, amfiteater edukatif, hingga *co-learning space* dalam satu konfigurasi terpadu. Berbeda dengan taman kota konvensional yang dominan outdoor maupun gedung budaya yang dominan indoor, tipologi hibrida menghadirkan fleksibilitas penggunaan,

adaptivitas terhadap waktu dan cuaca, serta potensi pembentukan perilaku kolaboratif melalui interaksi lintas ruang.

Pendekatan arsitektur perilaku menjadi landasan dalam perancangan ruang publik edukatif hibrida ini. Dalam perspektif *environment-behavior studies*, ruang tidak hanya dipahami sebagai wadah aktivitas, melainkan sebagai instrumen yang mampu membentuk dan mengarahkan perilaku melalui pengaturan tata ruang, skala, sirkulasi, visibilitas, dan affordance spasial. Dengan memahami pola interaksi masyarakat kota, rancangan diharapkan mampu menciptakan *behavior setting* yang mendukung kolaborasi, literasi, rasa aman, dan keterlibatan sosial secara berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, perancangan *Jogja Kawruh Hub* sebagai ruang publik edukatif hibrida dengan pendekatan arsitektur perilaku menjadi relevan sebagai respons terhadap keterbatasan ruang publik eksisting, kesenjangan capaian RTH publik, serta kebutuhan kota pendidikan akan ruang pembelajaran informal yang inklusif dan adaptif. Fasilitas yang diakomodasi meliputi perpustakaan, ruang diskusi komunitas, amfiteater edukatif, *co-learning space*, serta area bermain edukatif anak. Fasilitas pendukung seperti aksesibilitas universal bagi penyandang disabilitas, pencahayaan yang memadai, sistem keamanan, ruang teduh, serta konektivitas digital (*WiFi* publik) menjadi bagian integral dari desain. Perancangan ini diharapkan tidak hanya menambah kuantitas ruang publik, tetapi juga meningkatkan kualitasnya sebagai ruang sosial-edukatif yang memperkuat identitas Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang humanis dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang *Jogja Kawruh Hub* sebagai ruang publik edukatif hibrida yang mengintegrasikan sistem ruang *indoor-outdoor* secara fleksibel dan adaptif, sehingga mampu menjawab keterbatasan ruang publik eksisting di Kota Yogyakarta serta membentuk perilaku sosial kolaboratif melalui pendekatan arsitektur perilaku?

1.3 Tujuan/Proposisi

Tujuan dari LP3A ini adalah merumuskan konsep perencanaan dan perancangan *Jogja Kawruh Hub* sebagai ruang publik edukatif hibrida yang responsif terhadap karakter Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan, dengan menerapkan pendekatan arsitektur perilaku guna menciptakan ruang yang mampu membentuk perilaku sosial kolaboratif, meningkatkan kualitas interaksi masyarakat, serta memperkuat fungsi ruang publik sebagai infrastruktur sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Subjektif

Bagi penulis, perancangan *Jogja Kawruh Hub* menjadi sarana penerapan ilmu arsitektur dalam merespons keterbatasan ruang publik di kawasan urban padat Kota Yogyakarta melalui pendekatan arsitektur perilaku dan konsep ruang hibrida (*indoor–outdoor*).

1.4.2 Manfaat Objektif

Manfaat dari perancangan ini secara objektif adalah:

- a) Memberikan rancangan desain *Jogja Kawruh Hub* sebagai ruang publik edukatif hibrida yang mengintegrasikan fungsi ruang terbuka dan ruang tertutup secara terpadu, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan literasi, diskusi, rekreasi edukatif, serta interaksi sosial masyarakat Kota Yogyakarta secara inklusif dan fleksibel.
- b) Menawarkan alternatif desain ruang publik dengan pendekatan arsitektur perilaku yang memperhatikan pola aktivitas, interaksi sosial, serta kenyamanan psikologis pengguna dalam satu wadah arsitektur, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengembangan ruang publik di kawasan urban lain.

1.4.3 Lingkup Pembahasan

Pembahasan dalam perancangan ini difokuskan pada aspek disiplin ilmu arsitektur yang berkaitan dengan perancangan ruang publik edukatif hibrida di kawasan urban padat Kota Yogyakarta dengan pendekatan arsitektur perilaku sebagai landasan konseptual. Kajian meliputi analisis konteks kawasan, tata ruang, integrasi fungsi indoor–outdoor, zoning dan sirkulasi, serta hubungan spasial antara ruang publik dengan lingkungan sekitar. Referensi dari bidang ilmu lain seperti psikologi lingkungan, sosiologi perkotaan, dan kebijakan tata ruang digunakan sebagai penguat argumentasi, namun keluaran utama tetap berupa konsep dan rancangan arsitektur.

1.5 Metode

1.5.1 Metode Deskriptif

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data primer maupun data sekunder. Data-data yang dimaksud adalah tinjauan fisik maupun non-fisik serta bahan literatur yang berkaitan dengan studi perencanaan dan perancangan ini.

1.5.2 Metode Komparatif

Metode ini dilakukan dengan melakukan studi banding objek sejenis yang telah terbangun, guna diidentifikasi dan dianalisis sebagai bahan perbandingan dalam menemukan solusi serta gagasan inovatif untuk perancangan yang lebih optimal.

1.5.3 Metode Dokumentatif

Metode ini dilakukan dengan mengambil gambar dan video dari lokasi perancangan yaitu di Kota Yogyakarta yang akan digunakan sebagai pelengkap data-data pada proposal.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan proposal ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode, sistematika pembahasan, dan alur berpikir.

BAB II STUDI LITERATUR

Berisi kajian teori yang relevan dengan perancangan ruang publik edukatif, meliputi konsep ruang publik, teori arsitektur perilaku, interaksi sosial dalam ruang kota, serta studi preseden ruang publik di dalam maupun luar negeri.

BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI

Berisi data-data fisik dan non-fisik mengenai lokasi yang nantinya akan digunakan, serta menganalisis keadaan geografis, topografi, dan hal lain mengenai lokasi tersebut.

BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

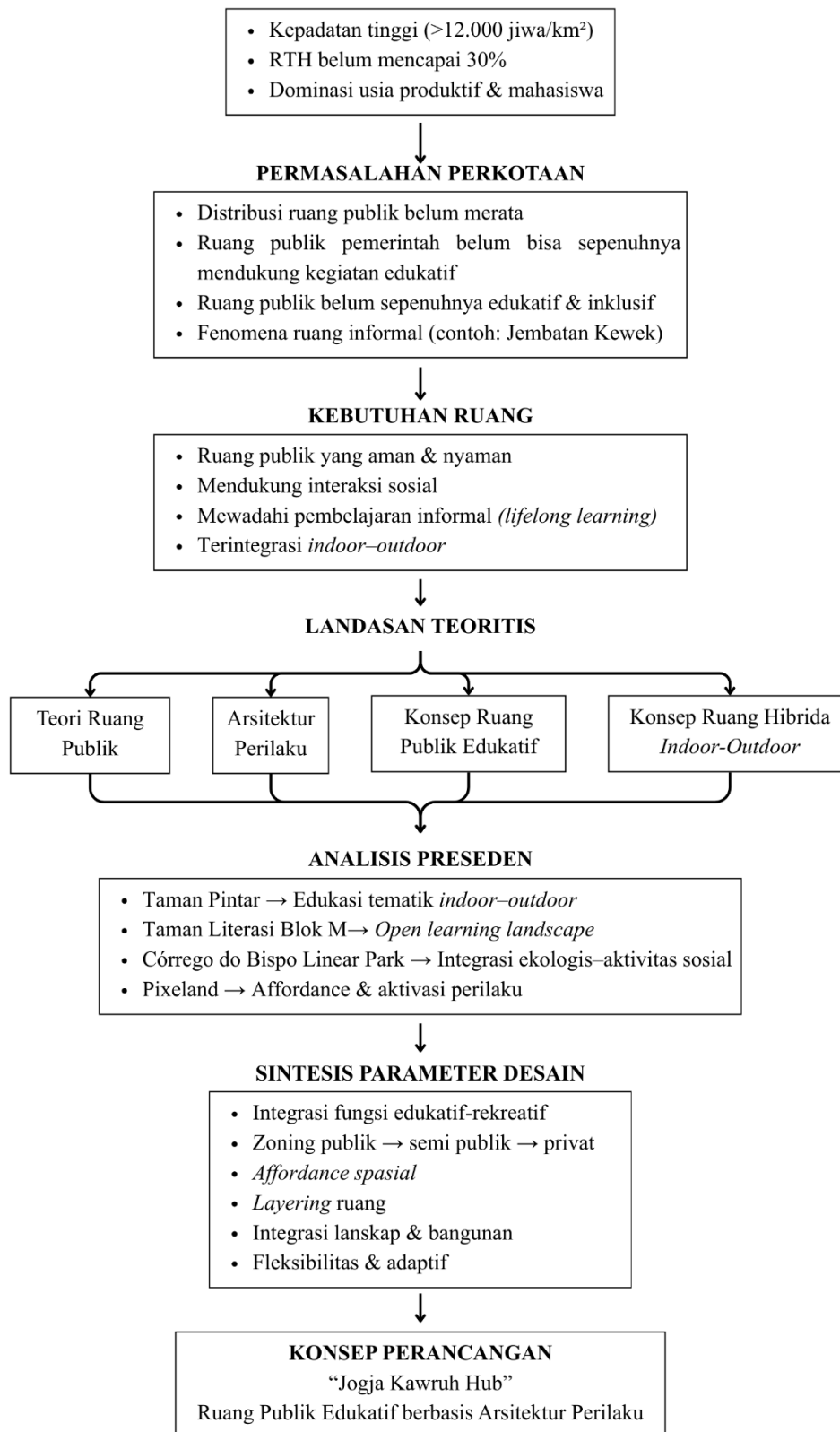
Bab ini membahas landasan dalam menyusun pendekatan konsep perencanaan serta rancangan awal, yang meliputi analisis terhadap aspek fungsional, kontekstual, arsitektural, teknis, dan kinerja.

BAB V PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

Berisi tentang program ruang dan tapak terpilih sesuai dengan konsep yang ditinjau dari analisa non-fisik dan analisa fisik terhadap aspek arsitektural, teknis, dan kinerja.

1.7 Alur Berpikir

KONTEKS KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN



Gambar 1.8 Alur Berpikir
(Sumber: Analisis Pribadi, 2026)